

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur :

- Fuady, Ahmad Helmi, dkk., 2002. *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta : UPP IDEA Press.
- Eko Yunanto, Sutoro, 2014. *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa*. Jakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Handayani, 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : PT. Eresco.
- Koesoemaatmadja, 1979. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.*, Bandung : Bina Cipta.
- Koirudin, 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Malang : Averroes Press.
- M.D., Soewito, 2007. *Tanya Jawab Memahami Pengaturan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Nuansa Mulia.
- Malayu, S.P. Hasibuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Muslimin, Amrah, 1986. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung : Alumni, 1986.
- Ndraha, Taliziduhu, 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurmayani, 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung.
- Pringgodigdo, A.K., 1974. *Tiga Undang-Undang Dasar*. cet. 4, Jakarta Pembangunan.
- Rudy, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung : Indepth Publishing.
- Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- Soleh, Chabib dan Rochmanyah, Heru, 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Sukirno, Sadono., 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Perkasa.
- Suryaningrat, Bayu., 1980. *Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahannya*. Jakarta : Metro Pos.
- Sutedi, Adrian, 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Widjaja, A.W. 1996. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wasistiono, Sadu, dan Tahir, M. irawan., 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia : Bandung.
- Yasir, Armen, 2007. *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung.
- Yuswanto, 2014. *Hukum Keuangan Negara*, Bnadar Lampung : Justice Publisher, 2014.

## **B. Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 *Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Lampung Tengah.*

**C. Situs :**

Darmawanto Ajimairah, “Otonomi Desa yang Diakui dan Dilindungi”,  
<http://waleabesar.blogspot.co.id>.

Diakses Pada 18 September 2015, Pukul 06.10.